

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum TPST Piyungan

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Yogyakarta adalah salah satu prasarana pengelolaan sampah yang dimanfaatkan oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Awalnya berdirinya TPST Piyungan, pengelolaan TPST Piyungan menjadi wewenang Provinsi. Sebagai bukti pada tahun 1996 s/d 1999 TPAS / TPST Piyungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2000 sampai tahun 2014 pengelolaan TPAS / TPST Piyungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama Sekretariat Bersama Kartamantul.

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 tahun 2014 maka pada tahun 2015 sampai sekarang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional diserahkan kembali kepada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (Balai PISAMP). BALAI PISAMP sendiri merupakan sub Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

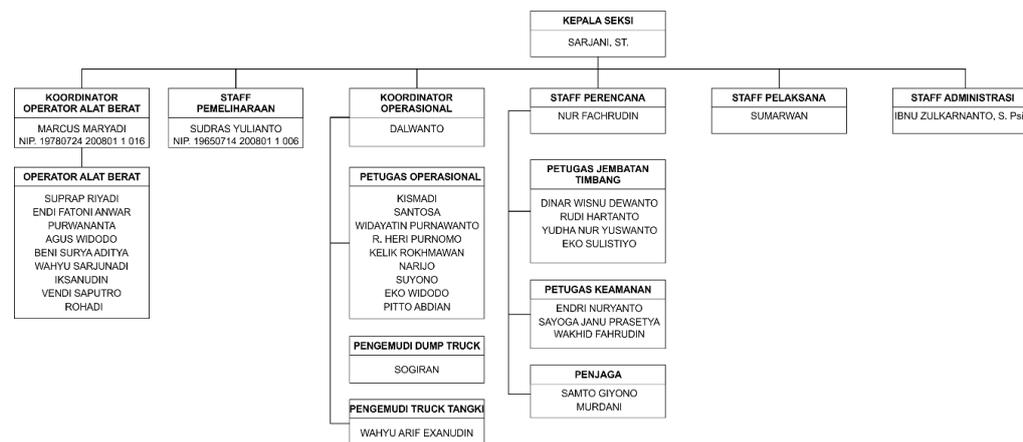
4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis

TPST Piyungan berlokasi di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPST atau singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan menempati tanah seluas 12,5 ha (10 ha untuk lahan pembuangan sampah, 2,5 ha lahan kantor dan sarana

4.1.2. Struktur Organisasi Pengelola

Mulai 1 Januari 2018 TPST Piyungan telah dikelola kembali oleh Pemerintah Daerah DIY. Ini karena sebelumnya pengelolaan dilakukan oleh Sekretariat Bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul). Pergantian pengelola ini juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY No.92 Tahun 2015 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM).

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelola TPST Piyungan



Berdasarkan hal itu, maka pengelolaan TPST Piyungan berada dalam ranah Dinas PU-ESDM DIY. Maka dari itu dibentuklah satuan Unit Pengelola Teknis yang dibawah langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY yakni Balai PISAMP. Balai Pisamp (Pengelolaaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan) ini sebelumnya Balai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Sewon. Sehingga, pengelolaan TPST Piyungan dikelola langsung oleh Seksi Operasi dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah dari Balai Pisamp.

Adapun jenis layanan pada Balai PISAMP tidak hanya pada pengelolaan sampah di TPST Piyungan. Ada tiga jenis layanan yang menjadi ranah Balai PISAMP yaitu: 1) Pengelolaan Air Limbah Regional, 2) Pengelolaan TPST Piyungan, dan 3) Pengelolaan Sistem Jaringan Air Minum Regional

4.1.3. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana TPST Piyungan

Jenis Barang	Merk	Tahun		Asal Usul	QTY	Keterangan
		Buat	Beli			
Buldozer	Caterpillar	1996	1996	Hibah Pem. Swiss	1	RUSAK BERAT
Wheel Loader	Caterpillar	1996	1996	Hibah Pem. Swiss	1	RUSAK BERAT
Buldozer	Hitachi	1996	1996	Proyek PLP DIY	1	RUSAK BERAT
Exavator	Caterpillar	1996	1996	Hibah Pem. Swiss	1	RUSAK BERAT
Exavator	Pindad	2016	2017	Pengadaan	1	READY
Buldozer	Caterpillar		2005	PSDP	1	RUSAK RINGAN
Buldozer	Caterpillar	2011	2012	PLP Prov.	1	RUSAK BERAT
Buldozer	Caterpillar	2014	2015	PLP Prov.	1	RUSAK RINGAN
Buldozer	Komatsu	2014	2015	PLP Prov.	1	RUSAK RINGAN
Buldozer	Komatsu	2016	2017	PLP Prov.	1	RUSAK RINGAN
Buldozer	Komatsu		1996	Proyek PLP DIY	1	Pinjam (RUSAK)
Land Compactor	Bomag	2015	2016	Pengadaan	1	READY
Genzet			1996	Proyek PLP DIY	1	
Genzet Kecil	General	2012	2012	Dana Sharing	1	
Mesin Cuci	General	2011	2011	Dana Sharing	1	
Water Tredment	Dunia	2011	2011	Dana Sharing	1	RUSAK

	Gemini					
Mesin Pencacah	IN-DA	2011	2011	Dana Sharing	1	
Portal	Barrier Gate	2012	2012	Dana Sharing	1	RUSAK
Portal	Barrier Gate	2012	2013	Dana Sharing	1	RUSAK
Mesin Fogging	Super Fogger	2012	2013		2	
Mesin Potong Rumput	Tanaka	2012	2013		2	

Dokumen sarana ini merupakan pendataan terakhir yang dilakukan oleh pengelola. Tabel diatas menunjukkan daftar semua sarana operasional TPST Piyungan berikut kondisinya. Sarana dan prasarana berhubungan erat sekali dengan kelancaran dan efektifitas operasional TPST Piyungan. Ini karena TPST Piyungan menerima sampah dari tiga kabupaten setiap harinya. Maka operasional TPST yang tinggi seharusnya diikuti dengan fasilitas saran yang memadai.

Namun, berdasarkan analisa dan interpretasi dokumen sarana dan prasarana dari pengelola TPST Piyungan tersebut diketahui bahwa hampir sebagian besar sarana dalam keadaan tidak bisa dioperasikan secara efektif. Ini karena sebagian besar alat berat dalam keadaan rusak. contohnya dari sebelas buah alat berat di TPST Piyungan hanya satu yang masih bisa beroperasi dengan baik, yang lainnya dalam keadaan rusak.

4.2. Gambaran Umum Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP

Muhammadiyah

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga/majelis organisasi muhammadiyah yang berbasis masyarakat. Maksudnya berbasis masyarakat ialah lembaga yang didirikan dengan tujuan

memperjuangkan nasib rakyat kecil dan termarginalisasi. Contohnya pedagang asongan, tukang becak, kaum difabel dan juga pemulung. Ini karena MPM mempunyai dasar ide dan gerakan serta visi, misi bahkan tujuan yang jelas akan hal itu.

MPM juga merupakan manifestasi dari peran Muhammadiyah dalam pengembangan masyarakat madani di Indonesia. Munculnya komitmen pemberdayaan sosial serta melihat potensi masyarakat dari masyarakat tidak terlepas dari tuntutan yang dihadapi oleh Muhammadiyah untuk dapat berpihak dan membela problem-problem masyarakat di akar rumput dan komunitas *mustadh'afin* dalam berbagai ruang lingkup dan variasinya.

Oleh sebab itu lah, Muhammadiyah berusaha menerjemahkan ide-ide dasar tadi dengan berbuat secara nyata. Sebagai buktinya terbentuklah Majelis Pemberdayaan Masyarakat ini. Muhammadiyah berusaha merepresentasikan semua latar belakang yang berada di wilayah intelektualisme dan idealisme tersebut menjadi hal yang berbentuk praktis seperti program dan kegiatan yang tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya ditujukan kepada masyarakat “akar rumput” dan “*mustadh'afin*” serta dengan kebutuhan, permasalahan dan seluruh potensi yang dimiliki mereka.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat melakukan perumusan dengan jelas terhadap ide dasar, visi, misi, tujuan, basis gerakan dan semua yang berhubungan dengan apa yang menjadi prinsip menjadi sebuah profil lengkap. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah mempunyai gerakan dan tujuan yang jelas serta kesungguhan dalam mengejawantahkan prinsip yang bersifat teori dan idealisme dalam sebuah gerakan yang berkesinambungan dan terus dilakukan. Berikut peneliti

cantumkan Visi, misi, alur gerakan, basis, struktur organisasi bahkan dasar gerakan MPM secara detail:

4.2.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan hasil dokumentasi dari *website* resmi Majelis pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah mempunyai visi yaitu meningkatkan kapasitas daya saing dan posisi tawar , dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan Oemem (PKO) dan gerakan Al Maa'uun, menuju kehidupan sosial yang adil, sejahtera dan berkeadaban". Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan tujuan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah yaitu: 1. Melakukan penataan kapasitas organisasi dan kelembagaan. 2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat. 3. Meningkatkan intensitas (massifikasi) pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota dan desa, serta kaum difabel. 4. Meningkatkan posisi daya tawar masyarakat

4.2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menunjukkan bahwasanya ada individu-individu yang terlibat dan bertanggungjawab dalam lembaga ini. Maksudnya terlibat dan bertanggungjawab ialah individu tersebut berfungsi secara aktif

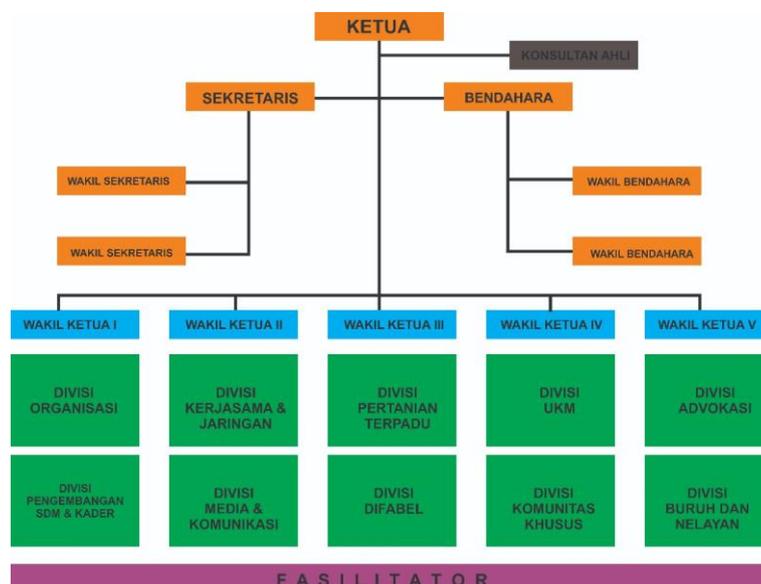
melakukan tugas yang telah dibagi berdasarkan fungsinya serta bertanggungjawab atas tugas dan fungsi tersebut.

Struktur organisasi MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Terdiri atas Ketua MPM PP Muhammadiyah, Wakil Ketua Bidang Kader dan Organisasi, Wakil Ketua Bidang Pertanian Terpadu, Wakil Ketua Bidang UMKM dan Komunitas, Khusus, Wakil Ketua Bidang Advokasi Buruh dan Nelayan, Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Publikasi. Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara.

Setiap wakil ketua membawahi masing-masing dua divisi dan setiap divisi diatur oleh masing-masing satu koordinato yakni sebagai berikut:

Wakil Ketua I membawahi Divisi Organisasi dan Divisi Pengembangan Kader, **Wakil Ketua II** membawahi Divisi Kerjasama dan Divisi Media, **Wakil Ketua III** membawahi Divisi Pertanian Tepadu dan Difabel, **Wakil Ketua IV** membawahi Divisi UMKM dan Divisi Komunitas Khusus, **Wakil Ketua V** membawahi Divisi Advokasi serta Divisi Buruh dan Nelayan.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi MPM PP Muhammadiyah



Struktur organisasi MPM mempunyai masa/periode kepengurusan. Ini terjadi karena adanya regenerasi dan kaderisasi yang dilakukan di MPM PP Muhammadiyah ini. Peneliti disini mencatatkan struktur dan jabatan organisasi MPM pada masa kepengurusan atau periode 2015-2020.

Tabel 4.2 Daftar Jabatan dan Anggota MPM PP Muhammadiyah

KONSULTAN AHLI	Prof. Dr. Bambang Setiaji
	Prof. Dr. Ali Agus
	Ir. Syafii Latuconsina
	Dr. Ir. Gunawan Budianto, MP
	Dr. Sudirman Saad
	Drs. Sudibyo Markus
	Eko Prasetyo, SH
	Drs. Zulkifli Halim, M.Si
	Lalu M Iqbal, Ph.D
KETUA	Dr. M. Nurul Yamin, M.Si
Wakil Ketua	Ahmad Ma'ruf, SE, M.Si
	Budi Nugroho, S.IP
	Prof. Dr. Sudjono
	Amir Panzuri, SS
	Syahril Syah, S.IP
SEKRETARIS	Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I, MPA
Wakil Sekretaris	Hadi Sutrisno, S.IP
	Kumajaya, S.IP.
BENDAHARA	Nasrullah, SIP., M.Si.
Wakil Bendahara	Dr. Sardjito
Wakil Bendahara	Ipung Ristiyanti, SE.I
Divisi Organisasi	
Koordinator	M. Sobar, SE.I, M.Si
Anggota	M. Lutsfi, SH.I
	Jamaluddin Hakim
	Fauzi Islah
Divisi Pengembangan SDM	
Koordinator	Gita Danupranata, SE, MM.
Anggota	Fathur Rahman, S.Pd, M.Si

	Hendro Sucipto, S. Th.I MM
	Andika
Divisi Kerjasama dan Jaringan	
Koordinator	Machhendra Setya Atmaja
Anggota	Azza El Munadiyan, SS.i
	Muttaqien, SS, M.KM
	Himmatul Hasanah, MP
Divisi Media dan Komunikasi	
Koordinator	Drs. Heri Purwata
Anggota	Imam Prihadiyoko, S.IP
	Rosa Kusuma Azhar, S.Pd
	Dzar Al Banna, S.S.
Divisi Pertanian Terpadu	
Koordinator	Dr. Bambang Suwignyo
Anggota	Ir. Achmad Romadhoni, S.Pt. M.Sc
	Aman Nurohman Kahfi, S.TP
	Ir. Shofiatini
	Suadi, Ph.D
	Dr. Indardi
	M. Abduh Zulfikar, S.Pt
	Dr. Kun Sarisma
Divisi Komunitas Khusus	
Koordinator	Wuri Rahmawati, MP
Anggota	Sigit Nugroho, SE
	dr. Sunarto
	Dr. Muhtadi
	Tuhu Hermawan
Divisi UKM	
Koordinator	Yudi Nasution, SS
Anggota	: Surahma Mula Sari, S.Si, M.Kes
	Dr. Masduki AL Banjar
	Zen Al Wahab, S.IP
	Dr. Hempri Priyatna
	Iqbal Tuasikal, SS, MSi
Divisi Difable	
Koordinator	Dra. Arni Surwanti, M.Si

Anggota	Ir. Didik Widyantono, MP
	Ahmad Rizal
	Budhi Hermanto, S.Sos.I
	Dra. Sudarmini
	Shanti Wardaningsih, Ph.D
Divisi Advokasi	
Koordinator	Farid Muadz, SH
Anggota	Irvan Mawardi, SH, MH
	Rusdianto, SIP, M.IK
	Nukman Iskandar, S.IP, MA
	Aswan Ghazali, SH
	Said Ramadhan, S.Sos.,MSi
	Sandro, SH
	Alfian Djakfar, SH, MH
Divisi Buruh dan Nelayan	
Koordinator	Hardiansyah, ST, MM
Anggota	Dede Kurniawan, A.Md
	Abdul Rahman, S.Pd
	Sutia Budi, SE,M.Si
	Nanang Qodir El Ghazali, ST

Berdasarkan interpretasi dokumen yang dilakukan peneliti, bahwasanya memang ditubuh organisasi MPM PP Muhammadiyah terdapat fungsi dan tanggungjawab yang jelas untuk masing individu. Di struktur paling atas misalnya ditugaskan dan diserahkan tanggungjawab kepada akademisi-akademisi yang memang sudah mumpuni dalam hal konsep dan idealisme/intelektualisme. Maka ini merupakan hal yang tepat dilakukan bahwa ada konseptor yang mumpuni yang berada disetiap program MPM.

Namun, gerakan/program tidak akan efektif jika hanya berkuat dalam idealisme dan teori semata. Maka dalam tubuh MPM juga terdapat agen pemberdayaan yang berfungsi sebagai penerjemah teori, konsep dan ide yang

telah diciptakan menjadi sebuah program dan dilakukan secara konsisten. Ini dilakukan oleh “fasilitator”. Fasilitator menjadi ujung tombak sebuah program dan berfungsi menjembatani antara masyarakat dan semua kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.

4.2.3. Basis Nilai Gerakan

MPM menjadikan Al-Qur`an Surat Al-Ma`un sebagai basis nilai yang menginspirasi gerakan pemberdayaan masyarakat.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya.

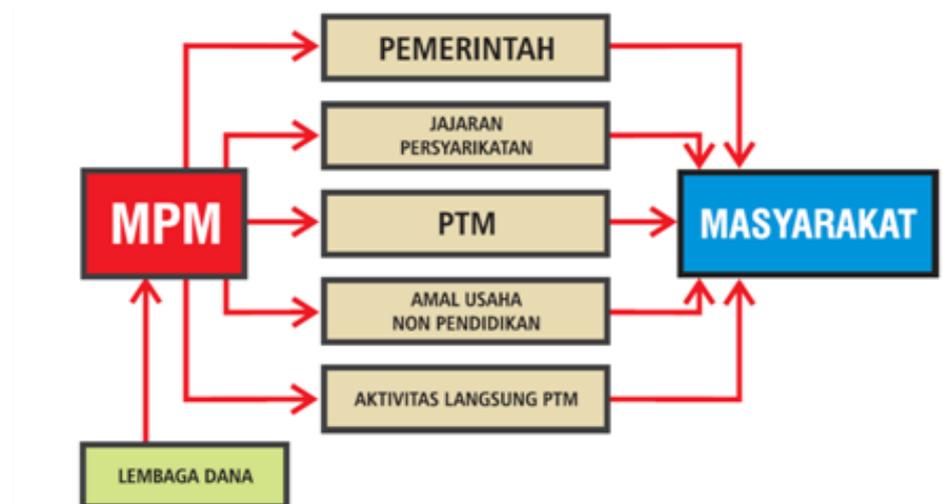
Tiga ayat awal dari surat Al-Ma`un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan thayib. Kalau ”tidak menganjurkan memberi makan orang miskin” menjadi salah satu indikator dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

4.2.4. Alur Gerakan Majelis

Untuk mewujudkan peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, dalam operasionalnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk empat divisi yaitu :

- a. Divisi Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Organisasi
- b. Divisi Pengembangan Model-Model Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat
- c. Divisi Advokasi Kebijakan
- d. Divisi Pengembangan Jaringan

Gambar 4.4 Alur Gerakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah



4.2.5. Program Unggulan MPM

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM-PP) Muhammadiyah memiliki program-program konkret untuk mencapai tujuan-tujuan, bahkan visi dan misinya. Sebagai bukti, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM-PP) Muhammadiyah merumuskan bahwa

terdapat program-program utama yang menjadi unggulan. Program-program ini menjadi prioritas utama dalam setiap gerakannya. Ini menjadi alasan program-program tersebut disebut jihad untuk menunjukkan keseriusan terhadap program-program tersebut. *Pertama* ialah Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan, meliputi antara lain 1) Mengembangkan model Pertanian Terpadu (Integrated Farming), 2) Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pertanian Terpadu, 3) Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, serta 4) Mengembangkan Kapasitas Masyarakat untuk Memasarkan Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM-PP) Muhammadiyah juga mengadakan Jihad Memberdayakan Sektor Informal dan Kaum Buruh. Pemberdayaan Sektor Informal meliputi antara lain: 1) Pendampingan Pedagang Asongan, 2) Pendampingan Abang Becak, 3) Pendampingan Kaki Lima, Dan 4) Pendampingan Berbagai Sektor Informal Lainnya. Sedangkan Pemberdayaan Kaum Buruh, meliputi antara lain: 1) Penguatan Kapasitas Buruh Migran untuk Mengembangkan Usaha, 2) Pendampingan Terhadap Keluarga Buruh Migran di Tanah Air, dan 3) Pendampingan Buruh Gendong.

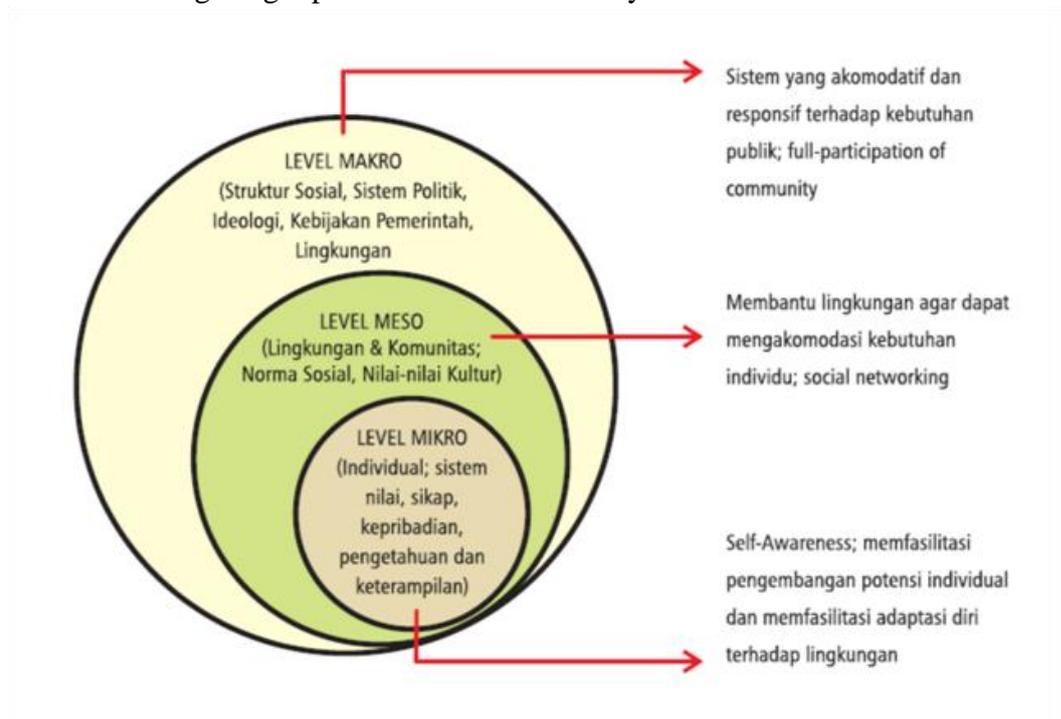
Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM-PP) Muhammadiyah juga merumuskan Jihad Advokasi Kebijakan Publik dan Kaum Difabel. Dalam kegiatan untuk Advokasi Kebijakan Publik meliputi antara lain: 1) Advokasi Kebijakan Publik yang Merugikan Rakyat, 2) Advokasi Penyusunan APBN maupun APBD. Sedangkan Jihad

Memberdayakan Kaum Difabel, meliputi antara lain: 1) Penguatan Kapasitas Kaum Difabel, 2) Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel, dan 3) Lapangan Kerja bagi Kaum Difabel.

4.2.6. Ruang Lingkup dan Peran

Dalam menjelaskan cara kerja aktivitas pemberdayaan dalam berbagai konteks, Majelis Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia (ecology of human development) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya.

Gambar 4.5 Ruang Lingkup MPM PP Muhammadiyah



Berdasarkan relasi antarlevel tersebut, bidang garap yang akan diberdayakan oleh Majelis adalah: 1) Penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, 2) Pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat (yang miskin dan termarginalisasi), 3)

Advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarginalisasi, dan 4) Pengembangan pusat penanggulangan krisis (recovery center) di tingkat regional dan wilayah yang berfungsi sebagai respon cepat dan antisipasi terhadap problem-problem psikososial di masyarakat.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, filosofi pemberdayaan yang dikembangkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah: “Mengembangkan cebong yang hanya mampu hidup di dalam kolam kecil menjadi katak yang dapat melompat ke mana-mana” Sedangkan Peran Majelis Dalam Pemberdayaan Masyarakat:

1. Sebagai fasilitator dan koordinator program pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah (termasuk ortom dan amal usaha) dalam berbagai skala dan variasi/konsentrasi kegiatan
2. Sebagai inspirator dan motivator bagi warga Muhammadiyah untuk mengembangkan jiwa prososial dan voluntarisme
3. Sebagai mediator individu, lingkungan, dan sistem yang lebih luas

4.2.7. Program/Kegiatan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan

Program/kegiatan merupakan representasi dari misi dan proses analisa terhadap sasaran pemberdayaan. Maksudnya representasi dari misi dan proses analisa ialah program yang dilakukan harus didasarkan pada data yang ditemukan di lapangan. Data yang dimaksud ialah terkait masalah, kebutuhan serta potensi. Ini penting karena proses pemberdayaan masyarakat harus tepat

sesuai masalah dan potensi masyarakat setempat. Sebagai bukti, di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan ini sendiri MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) merumuskan beberapa masalah harus diselesaikan melalui pemberdayaan masyarakat, baik itu masalah ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan bahkan spiritual.

Di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan yang merupakan salah satu tempat pendampingan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berdasarkan *assesment* dan analisis sosial yang dilakukan tim MPM PP Muhammadiyah pada sekitar awal 2016 (Rahmawati, 2018) ditemukan bahwa ada berbagai masalah aspek kehidupan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang perlu ditingkatkan serta diberdayakan. Misalnya dari segi sosial, warga di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang sebagian besar hidup dari sampah atau menjadi pemulung dipandang rendah dan menjadi *trouble maker* bagi lingkungan. Dari segi kesehatan dan lingkungan, masyarakat yang tinggal di sekitar TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) mendapat dampak negatif dengan adanya sampah tersebut, seperti bau tak sedap, alat yang banyak, bahkan tercemarnya air. Meskipun dari segi ekonomi, faktanya ternyata tidak ada masalah berarti karena pendapatan masyarakat yang menjadi pemulung menjadi meningkat dari hasil memilah sampah.

Maka peneliti merumuskan secara umum ada beberapa aspek/bidang yang menjadi fokus utama MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Aspek/bidang ini ialah kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan spiritual. Misalnya, dalam bidang kesehatan fokus utamanya ialah peningkatan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat). Dalam

bidang sosial, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencoba memfasilitasi dan mengadvokasi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan ini, baik itu nanti programnya berupa pelatihan, penyuluhan bahkan berupaya mengimplementasikan energi alternatif yang berasal dari sampah. Masalah-masalah di setiap bidang kemudian dibentuk menjadi program-program atau kegiatan dalam aksi nyata yang melibatkan banyak pihak. Beberapa kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. *Brainstorming* dan Pemetaan Potensi Pemberdayaan Pahlawan Lingkungan Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan tahap awal dalam pemberdayaan yang dilakukan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2016 ini bertujuan mengetahui masalah serta potensi apa yang dimiliki TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah pihak antara lain Balai PISAM DIY, Badan Lingkungan Hidup DIY, Dinas Kesehatan DIY, Sekber Kartamantul, serta perwakilan dari Paguyuban Pahlawan Lingkungan TPS Piyungan.

2. Sambung Rasa Pahlawan Lingkungan dan Peresmian Komunitas MARDIKO

Kegiatan ini merupakan hasil dari *assesment* dan kegiatan *brainstroming* yang telah dilakukan sebelumnya. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai bahwa pemulung dapat dikategorikan sebagai ‘Pahlawan Lingkungan’ dan perlu

adanya upaya lebih lanjut untuk merubah pandangan negatif yang melekat pada profesi pemulung. Oleh karena itu, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun berinisiatif untuk lakukan pendampingan kepada komunitas pemulung yang terletak di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan, dusun Ngablak, desa Stimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan pada Minggu tanggal 10 maret 2016 bertempat di Mushalla Baitussalam Komplek TPST Piyungan. Sambung Rasa Pahlawan ini merupakan kegiatan peresmian Komunitas/Kelompok dampingan MPM di TPST Piyungan, yaitu MARDIKO (Makaryo Adi Ngayogyakarta). Kegiatan/program ini bertujuan menumbuhkembangkan rasa empati dan simpati antar stakeholder yang mempunyai kepedulian terhadap Pahlawan Lingkungan Yogyakarta serta mendekatkan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Paguyuban Pemulung Yogyakarta melalui program pemberdayaan komunitas khusus. Program ini tidak hanya diikuti oleh warga atau MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) saja. Sebagai bukti MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang berbagai stakeholder dari Pemerintah serta organisasi Muhammadiyah Piyungan, antara lain: Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM DIY, Badan Lingkungan Hidup DIY, Balai PISAM DIY, Sekber Kartamantul, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Bantul, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pleret, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Piyungan, dan Paguyuban Pahlawan Lingkungan Yogyakarta

3. Pengajian Rutin, Pembaharuan Anggota Mardiko serta Pelatihan Cuci Tangan

Kegiatan yang dilakukan pada Minggu 22 Mei 2016 ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan komunitas MARDIKO (Makaryo Adi Ngayogyokarto) bersama MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini bertempat di Mushola At-Taqorub Komplek TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Pengajian diisi oleh Ustad Marsudi Iman dengan tema Bekerja dan Berpuasa di Bulan Ramadhan. Pengajian ini juga diisi dengan pembaharuan data anggota Komunitas Mardiko. Ada 450 anggota komunitas yang mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan pendataan.

Pembentukan Komunitas MARDIKO (Makaryo Adi Ngayogyokarto) ini bertujuan meningkatkan keakraban dan ajang silaturahmi di antara anggota, meningkatkan kesejahteraan Pahlawan Lingkungan Hidup TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi anggota Mardiko kepada pengelola TPST dan pemerintah terkait. Komunitas Mardiko memiliki aturan yang harus dipatuhi anggotanya. Di antaranya, Pahlawan Lingkungan yang tergabung dalam Mardiko wajib membayar iuran bulanan sebesar Rp 2.000. Anggota wajib menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan di lingkungan TPST. Anggota wajib mentaati keputusan pengurus dalam penataan lapak. Anggota wajib

menjaga kerukunan dan kesejahteraan antara pengelola, pengepul dan masyarakat. Bila terbukti melanggar aturan, anggota bersedia dikeluarkan dari komunitas dan tidak diperkenankan memulung di TPST Piyungan.

Selain itu, Komunitas MARDIKO ini mempunyai agenda yang secara rutin dilaksanakan. Contohnya, pertama, pertemuan pengurus sebulan sekali, setiap Ahad Wage. Kedua, pertemuan pengurus dan pengepul untuk sosialisasi agenda pengurus ke anggota, serta membahas persoalan yang muncul. Ketiga, pertemuan rutin besar antara pengurus, pengepul, dan pemulung. Pertemuan akbar ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pelatihan mencuci dengan baik dan benar kepada anggota Komunitas Mardiko. Pelatihan ini dilakukan mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Ini karena anggota Komunitas Mardiko setiap hari bergelut dengan sampah.

4. Kunjungan Studi Banding Pengelolaan Sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Bojonegoro Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kegiatan “Kunjungan Studi Banding Pengelolaan Sampah yang bertempat TPA di Bojonegoro Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan konsolidasi dan komunikasi serta masifkasi agenda aksi pemberdayaan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat

Komunitas Pemulung Mardiko TPST Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan pada Sabtu, 29 Oktober 2016 dengan pesertanya yakni antara lain: Pengurus Mardiko, Anggota Mardiko, Kepala dusun, kepala Desa, Ketua RT 01-05 Dusun Ngablak. di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Fasilitator dan Pengurus MPM PP Muhammadiyah.

5. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan bersama Lazismu, PKU Muhammadiyah serta UNISA Yogyakarta (Universitas Aisyiyah)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak, yakni antara lain Lazismu, PKU Muhammadiyah, dan Universitas Aisyiyah (UNISA). Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi warga sekitar TPST Piyungan khususnya anggota MARDIKO dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol

Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan pada Rabu tanggal 22 maret 2017 dan diperuntukan 150 anggota komunitas pemulung Makaryo Adi Ngayogyakarta (Mardiko) serta bertempat di Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Yogyakarta.

6. Workshop Pemberdayaan Komunitas Pemulung TPST Piyungan di DPD RI DIY

Dengan dimulainya proses pendampingan di TPST Piyungan, MPM PP Muhammadiyah mengadakan workshop Pemberdayaan Komunitas Pemulung “Mardiko” di DPD RI DIY. MPM PP

Muhammadiyah menggelar workshop bertujuan untuk melihat gambaran komprehensif tentang kondisi pemulung dan TPST Piyungan yang akan menjadi sumber dalam menyusun *blue print* pemberdayaan pemulung khususnya di TPST Piyungan. Dalam workshop dibahas mengenai beberapa topik penting terkait strategi yang tepat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, workshop dari workshop ini juga diharapkan nantinya dapat menemukan kegiatan yang dapat membantu para pemulung dalam peningkatan keterampilan sehingga dapat memberikan alternatif pendapatan lain bagi pemulung. MPM juga memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada pemulung dan masyarakat sekitar TPST dan menemukan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan di TPST Piyungan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 4 Mei 2017 ini diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, LSM, Perguruan Tinggi, Majelis, Lembaga dan Ortom Muhammadiyah serta anggota Komunitas Pemulung Mardiko. Peserta yang hadir antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian DIY Bidang Peternakan, Dinas PU, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup DIY, Balai PISAM, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, SEKBER KARTAMANTUL, OMBUDSMAN Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) DIY, LAZISMU PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Pimpinan Pusat Nasyi'atul 'Aisyiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PWM DIY, Majelis Hukum dan Ham (MHH) PWM DIY, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM DIY, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM DIY, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PDM Sleman, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PDM Kota Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PDM Bantul, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DIY, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piyungan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sitimulyo, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bawuran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Fakultas Kedokteran UII, Fakultas Peternakan UGM, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, LPPPM UMY, LPPM UNISA, LPPPM UAD, LPPM UII, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UMY, PKBH UAD, PUSHAM UII, Direktur PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Direktur PKU Muhammadiyah Gamping, Direktur PKU Muhammadiyah

Bantul, Direktur PKU Muhammadiyah Kota Gede, Direktur Rumah Sakit Rajawali Citra, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) DIY, *Youth For Climate Change* DIY, Camat Piyungan, Camat Pleret, Kepala Desa Sitimulyo, Kepala Desa Bawuran, Karang Taruna Sitimulyo, Ketua RT 01, 02,03, 04,05 Dusun Ngablak Sitimulyo Piyungan, Ketua RT 01,06 dan 07 Dusun Sentulrejo Bawuran Pleret, Mardiko 1, Mardiko 2, Mardiko 3, Mardiko 4, Mardiko 5

7. Workshop pengolahan pangan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul DIY

Kegiatan ini merupakan hasil dari advokasi MPM bersama *stakeholder* terkait dalam program yang telah dilakukan sebelumnya yang selalu mengundang pemerintah terkait dalam memberdayakan pemulung di TPST Piyungan. Dalam kegiatan ini salah satu dinas berusaha ikut andil dalam program pemberdayaan yang telah dirintis oleh MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dinas Pemerintah tersebut ialah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pemulung. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan lain bagi pemulung. Program ini dilaksanakan pada Senin 7 Agustus 2017 yang melibatkan peserta sebanyak 30 orang ibu-ibu anggota aktif Mardiko. Mereka yang mengikuti workshop tersebut selain mendapat

edukasi atau pelatihan juga menerima bantuan alat untuk membuat pangan seperti mie ayam, pastel serta keripik pisang dari dinas sosial.

4.3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat menurut Muhammadiyah

4.3.1. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan/kekerasan serta melibatkan semua masyarakat.

Pemberdayaan yang bersifat demokratis maksudnya ialah pemberdayaan yang melibatkan setiap individu karena setiap orang memiliki hak untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat dan minat yang berbeda. Oleh sebab itu pemberdayaan seharusnya memiliki makna kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi suatu komunitas atau masyarakat tertentu (Anwas, 2014: 50).

Pemberdayaan masyarakat juga sebisa mungkin menghindari unsur paksaan atau kekerasan. Paksaan atau kekerasan dalam konteks ini tidak hanya bermakna fisik. Penindasan secara struktural yang dilakukan instansi atau struktur sosial tertentu bisa dipandang sebagai kejahatan. Sebagai contoh, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, diskriminasi sosial, rasisme merupakan beberapa bentuk struktural yang merugikan sebagian masyarakat yang lain. Oleh karena itu perlu adanya unsur inklusifitas dan konsensus dalam prinsip pemberdayaan masyarakat (Gitosaputo dan Rangga, 2015: 24-25).

MPM PP Muhammadiyah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan telah

memegang prinsip demokratis. Maksudnya, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam programnya telah menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam programnya. Pemberdayaan harus dilakukan pada semua elemen masyarakat khususnya pemulung, tidak ada batasan tertentu, bahkan gender. Sebagai bukti, MPM PP Muhammadiyah dalam salah satu programnya, yakni “Workshop Pengolahan Pangan bersama Dinas Sosial Bantul” berusaha memberdayakan kaum perempuan atau ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemulung. Program ini fokus pada peningkatan keterampilan dalam menciptakan produk alternatif selain menjadi pemulung. Sebanyak 30 orang ibu-ibu anggota aktif Mardiko mengikuti workshop tersebut dan menerima bantuan alat untuk membuat pangan seperti mie ayam, pastel serta keripik pisang dari dinas sosial.

Program pembentukan kelompok/paguyuban pemulung juga menjadi salah satu program MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Paguyuban/Kelompok tersebut dinamakan MARDIKO (Makaryo Adi Ngayogyokarto). Salah satu tujuan Mardiko (Makaryo adi Ngayogyokarto) ialah menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi anggota Mardiko (Makaryo Adi Ngayogyokarto) kepada pengelola TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dan pemerintah terkait. Wadah aspirasi inilah yang menjadikan Mardiko juga sebagai indikator prinsip demokratis program yang telah dilaksanakan oleh MPM.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berusaha mendengar semua suara dan aspirasi pemulung. Melalui Mardiko (Makaryo Adi Ngayogyokarto) ini setiap pendapat masing-

masing individu atau setiap pemulung dikoordinasi dan disalurkan. Sehingga hak bersuara dan berpendapat terjamin dengan baik. Dengan begitu, agenda yang nantinya akan direncanakan dan dilaksanakan dipastikan berasal dari suara pemulung itu sendiri.

4.3.2. Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran (termasuk menumbuhkan nilai-nilai budaya lokal)

Adanya perbedaan unsur demografis, masalah dan sumber daya alam di setiap daerah menjadi alasan pemberdayaan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat setempat. Termasuk juga harus mengetahui budaya lokal yang juga menjadi pertimbangan dalam melakukan proses/upaya pemberdayaan masyarakat. Ini karena nantinya akan berdampak pada bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harus bersifat inklusif serta ketepatan pendekatan bahkan strategi pemberdayaan.

Pemberdayaan pemulung yang dilakukan oleh MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh kondisi pemulung yang termarginalisasi. Maksudnya, pemulung masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Pemulung terpinggirkan dari prioritas-prioritas program pengentasan masalah sampah di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab belum fokus pada “manusia” yang terdampak sampah tersebut. Padahal, dampak sampah yang menggunung tersebut mengakibatkan banyak masalah, seperti kesehatan dan juga lingkungan. Dikutip dari acara “Obrolan Tentang Warga” di channel *youtube* TVMU

(Televisi Muhammadiyah), Menurut Deputi Komunitas Khusus MPM PP Muhammadiyah, Wuri Rahmawati mengatakan:

Teman-teman pemulung ini adalah teman-teman yang termarginalisasi atau terpinggirkan. Kenapa termarginalisasi, karena teman-teman pemulung ini tidak lagi dianggap orang yang miskin oleh pemerintah dan tidak ada program yang sarannya adalah manusianya, selama ini pemerintah fokus pada infrastruktur berupa jalan, bangunan TPST nya dll.

Dari latar belakang itu, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Muhammadiyah mengetahui masalah dan kebutuhan utama pemulung di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Masalah utama ialah sampah yang berdampak pada perilaku hidup pemulung. Kehidupan pemulung yang sebagian besar dihabiskan di tempat sampah secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Maka dari itu, fokus utama program pemberdayaan pemulung di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan ialah Edukasi dan Peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) terhadap pemulung serta pemeriksaan kesehatan. Wuri Rahmawati mengemukakan bahwa program ini yang nantinya akan menjadi *goal* akhir program pemberdayaan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan, sebagaimana yang diungkapkannya:

Program Muhammadiyah karena fokus pada perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga nanti sebagai goal akhir, karena itu programnya yang pertama ialah melakukan edukasi pentingnya hidup bersih dan sehat. Itu penting, contoh yang paling sederhana dan hal sepele adalah mencuci tangan. Itu hal sepele bagi kita tapi tidak bagi pemulung, dan itu yang edukasikan pada teman-teman pemulung, bapak ibu kalau sudah mengambil sampah silahkan cuci tangan dahulu baru makan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya permasalahan utama dari pemulung ialah perilaku hidup bersih dan sehat. Pemulung tidak

mencuci tangan sebelum makan bahkan setelah memegang sampah karena Pengetahuan pemulung yang minim terhadap kesehatan. Dari situ banyak pemulung yang terkena penyakit disebabkan ketidaktahuan tersebut. Inilah yang menjadi masalah utama yang harus diedukasikan kepada pemulung.

4.3.3. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan disertai dengan pendampingan atau pembinaan. Juga dilakukan agar menumbuhkan kebiasaan untuk terus belajar

Pemberdayaan masyarakat yang bertahap disebut juga dengan pengembangan organik (*organic development*). Pengembangan organik sering diperbandingkan dengan pengembangan mekanik. Pengembangan yang diibaratkan dengan pertumbuhan sebuah tanaman. Maksudnya pengembangan yang bersifat kompleks, prinsip kerjanya yang susah dipahami, dan mempunyai ketergantungan tinggi terhadap lingkungan. Lain halnya dengan pengembangan mekanik yang diibaratkan seperti mesin yang dapat bekerja secara terpisah terhadap lingkungannya dengan prinsip kerja yang sama, serta mudah diperbaiki (Gitosaputo dan Rangga, 2015: 24-25).

Teori pengembangan organik tersebut berimplikasi pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat organik dan kompleks harus dilakukan dengan berkesinambungan atau keberlanjutan dengan terus dilakukan pendampingan. Ini karena untuk mencegah proses pengembangan masyarakat berjalan secara alami dan tidak melebihi kecepatan perubahan dinamikanya. Sehingga terjadinya proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka panjang dan benar-benar dilakukan oleh

masyarakat. Bukan karena agen pemberdayaan, pemerintah atau siapapun diluar komunitas/masyarakat sasaran (Gitosaputo dan Rangga, 2015: 24-25).

Upaya dalam mewujudkan masyarakat yang selalu ingin terus belajar ini merupakan salah satu tujuan adanya pendampingan/pembinaan atau penyuluhan. Secara bahasa dalam KBBI penyuluhan dan pendampingan mempunyai makna yang sama yakni proses, cara. Sedangkan menurut Van Den Ban dan Hawkins (dikutip dalam Anwas, 2014: 53), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Jadi pendampingan/pembinaan atau penyuluhan bisa diartikan sebuah proses edukasi kepada masyarakat untuk mendorong mereka terus belajar sehingga nantinya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik

Prinsip Pendampingan menjadi salah satu prinsip yang telah dilakukan oleh MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam proses pemberdayaan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Sebagai bukti, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut warga/komunitas/kelompok yang menjadi sasaran dengan sebutan “dampingan”. Sasaran pemberdayaan ini nantinya akan didampingi dalam jangka waktu yang panjang. Komunitas pemulung di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan yang mejadi sasaran pemberdayaan dimulai dari tahun 2016 dan masih berjalan sampai sekarang. Ini menjadi indikator bahwa MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah berupaya selalu terlibat dan terus menjalin komunikasi dengan sasaran pemberdayaan, sehingga mendorong warga untuk terus berupaya dan belajar terhadap kondisi yang dihadapinya dan solusi penyelesaiannya.

Ini juga tertuang dalam program-program yang dijalankan. Semua program yang dilakukan bersama pemulung selalu didampingi dan didukasi sedemikian rupa sehingga warga ingin terus belajar dan tidak mudah bergantung pada siapapun. Kunjungan Studi Banding ke TPA (Tempat Pembuangan Sampah) di Bojonegoro merupakan salah satu program yang dilaksanakan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama pemulung di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Program ini menjadi program yang bisa dikatakan sebagai program yang bersifat edukasi. Program ini ingin menunjukkan bahwasanya ada kondisi lingkungan yang mirip/serupa dengan kondisi lingkungan komunitas pemulung tersebut, namun terdapat aspek yang lebih maju yang patut dicontoh dari TPA (Tempat Pembuangan akhir) di Bojonegoro tersebut. Ini memberikan wawasan baru kepada para pemulung terhadap kondisi serupa dan inovasinya. Sehingga menumbuhkan semangat baru untuk menghadapi kondisi lingkungan di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan.

Selain itu program-program yang telah dilaksanakan sebagian besar berbentuk pelatihan dan penyuluhan. Contohnya Penyuluhan Kesehatan dan Cuci Tangan, Workshop Pengolahan Pangan, bahkan Pengajian. Bentuk program pelatihan dan penyuluhan ini tidak lepas dari *goal* akhir yang diharapkan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah terhadap pemulung yaitu penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat, “memang program yang dilakukan ialah edukasi pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dan itu menjadi *goal* akhirnya” (Wuri Rahmawati, 2018). Program-program ini merupakan bentuk dari prinsip mendorong untuk terus belajar. Ini karena, kesadaran akan timbul jika wawasan pemulung bertambah serta pengetahuan masalah kesehatan yang mengancam dan cara menanggulangnya.

Berdasarkan struktur organisasi kelembagaan di MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terdapat jabatan atau posisi yang dinamakan fasilitator. Fasilitator inilah yang selalu datang langsung ke lapangan dan mendampingi sasaran. Segala kebutuhan dan komunikasi disampaikan kepada fasilitator dan akan dievaluasi bersama nantinya. Ini menjadi indikator juga bahwa MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadikan pendampingan sebagai prinsip utama yang harus dilakukan.

4.3.4. Pemberdayaan masyarakat diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan serta agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator.

Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah orang yang berperan memfasilitasi atau menyediakan fasilitas, membantu, dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan. Agen pemberdayaan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dimulai dari memfasilitasi upaya

identifikasi kebutuhan, penentuan masalah, penetapan tujuan sampai cara mencapai tujuan.

Agen pemberdaya harus mampu memfasilitasi terjadinya pertemuan anggota masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam memecahkan kebuntuan hubungan yang terjadi. Maka dari itu, seorang fasilitator harus mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang kondisi dan situasi masyarakat setempat (Gitosaputo dan Rangga, 2015: 51).

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan ada dua pendekatan/metode yang dilakukan di TPST Piyungan ini. Pendekatan yang pertama dilakukan oleh MPM ialah “Keterbukaan” dan “Bukti Nyata”. Dikutip dari acara “Obrolan Tentang Warga” di channel *youtube* TV MU (Televisi Muhammadiyah), Menurut Deputy Komunitas Khusus MPM PP Muhammadiyah, Wuri Rahmawati mengatakan:

“Kami sempat ditolak, karena kebetulan waktu itu adalah rame-ramenya isu ISIS dan GAFATAR, sehingga masyarakat curiga bahwa kita datang untuk meng-ISIS-kan mereka, untuk me-Muhammadiyah-kan mereka, dan untuk meng-Gafatar-kan mereka. Kiat nya ya menyampaikan (tujuan) dengan keterbukaan secara persuasif. memang belum semua tahu siapa itu Muhammadiyah, karena disini masyarakatnya datang dari luar jogja, luar pulau, malah dari pulau jawa juga, dari Riau, Flores. Jadi Muhammadiyah datang dan menjelaskan bahwa Muhammadiyah datang tanpa uang, tapi dengan niatan baik untuk kemajuan teman-teman pemulung yang ada disini.”

Pernyataan diatas membuktikan bahwa metode atau pendekatan kepada komunitas pemulung di TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan dipengaruhi oleh isu-isu atau faktor eksternal dari sasaran pemberdayaan. isu ISIS serta GAFATAR menjadi alasan dan pertimbangan

masyarakat sekitar. Sehingga metode dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat akan terjadi sangat dinamis dan berubah-ubah di setiap lokasi atau daerahnya. Kondisi menuntut agen pemberdaya mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam membaca situasi serta kondisi dan menguasai teknik/teori pemberdayaan masyarakat.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai agen pemberdaya telah berperan sebagai fasilitator. Sebagaimana tercantum dalam “peran” di profil MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu “Sebagai fasilitator dan koordinator program pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah (termasuk ortom dan amal usaha) dalam berbagai skala dan variasi/konsentrasi kegiatan”. Menurut salah satu fasilitator MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sanupal Muzammil mengatakan:

“Prinsipnya MPM itu ya programnya dari warga atau pemulung. Karena sebelumnya sudah dilakukan *mapping* maka diketahuilah masalah yang paling penting. Kita fungsinya hanya menjembatani atau memfasilitasi saja kebutuhan-kebutuhan pemulung itu kepada *stakeholder* atau pemerintah-pemerintah terkait, karena gak mungkin kebutuhan pemulung dihandle MPM semua, MPM Cuma fasilitator”

Ini membuktikan bahwa peran yang dijalankan oleh MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai fasilitator menjadi prinsip utama gerakannya. Program dan kegiatan semua dihasilkan dari pemulung itu sendiri. Ini terbukti dari program-program yang telah terlaksana seperti “Workshop Pemberdayaan Komunitas pemulung TPST di DPD RI DIY’ yang mengundang banyak lembaga pemerintah, LSM

serta *stakeholder* yang lain. Sehingga dari program ini kebutuhan dan masalah pemulung diketahui dan tersampaikan pada banyak pihak.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai fasilitator juga tidak hanya fokus pada sasaran pemberdayaan. agen pemberdaya pada MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi fokus utama juga sebagai fasilitator. Sebagai bukti, dalam struktur kelembagaan terdapat posisi khusus sebagai “fasilitator”. Posisi fasilitator ini tidak bisa diberikan pada sembarang orang. Untuk menjadi fasilitator di MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah setidaknya harus melewati seleksi dan “sekam” (Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat) terlebih dahulu. Sehingga fasilitator mempunyai wawasan serta kompetensi untuk menjadi agen pemberdaya dan pendamping di lapangan.

4.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat menurut Muhammadiyah

Starategi merupakan cara atau metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi yang dimaksud disini ialah strategi pemberdayaan masyarakat. Maka pembahasan disini ialah strategi yang dilakukan supaya pemberdayaan berjalan sebagaimana mestinya dan diharapkan mencapai tujuan pemberdayaan. namun perlu diketahui bahwa dalam pemberdayaan masyarakat keberhasilan tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai tujuan dan hasilnya tapi juga pada tingkat prosesnya. Ini karena, strategi pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan gerakan oleh, dari dan untuk masyarakat (Anwas, 2014: 89).

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan bahwa cara kerja aktivitas pemberdayaan mengacu pada pendekatan

ekologi perkembangan manusia (ecology of human development) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya (Level Mikro, Meso dan Makro).

4.4.1. Level Mikro

Level mikro dalam hal ini ialah pemberdayaan pada tingkat terendah di sistem masyarakat yaitu Individu. Pemberdayaan pada level mikro ini merupakan pemberdayaan yang fokus pada sistem nilai, sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga objek atau tujuan pemberdayaan dalam level ini adalah *Self-Awareness* yakni dengan cara memfasilitasi pengembangan potensi individual dan memfasilitasi adaptasi diri terhadap lingkungan

Dikutip dari acara “Obrolan Tentang Warga” di channel youtube TV MU (Televisi Muhammadiyah), Menurut Deputi Komunitas Khusus MPM PP Muhammadiyah, Wuri Rahmawati mengatakan: “Mardiko ini bertujuan menciptakan brand baru bagi pemulung. Pemulung bukan sumber masalah, tapi pemulung orang yang berjasa pada lingkungan, yaitu sebagai pahlawan lingkungan (Rahmawati, 2018)”

Dari pernyataan diatas, kita artikan bahwa MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin mengubah citra dari sebuah stigma atau pandangan negatif masyarakat terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Stigma dan pandangan negatif maksudnya disini adalah yang diarahkan pada komunitas pemulung. Ini karena pemulung ialah kelompok masyarakat yang masih termarginalisasi atau terpinggirkan, dan Muhammadiyah lewat MPM berjuang untuk salah satunya pada

komunitas marginal tersebut. Sehingga dari pemulung sendiri merasa terangkat martabatnya dan diharapkan dapat mengubah pola pikir mereka untuk terus berupaya mandiri.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah lewat “Ruang Lingkup Pemberdayaan” mengemukakan bahwa salah satu bidang garapnya ialah Penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan program edukasi dan peningkatan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) sebagai program dan sasaran utama di TPST (Tempat Pembuangan Sampah) Piyungan.

Berdasarkan program yang telah dilakukan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdapat program “Kunjungan Studi Banding Pengelolaan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Bojonegoro. Program ini dilaksanakan pada sabtu (29/10/2016). Program ini diikuti pengurus dan anggota Mardiko (Makaryo Adi Ngayogyokarto), Fasilitator MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beserta perangkat dusun dan desa sekitar TPST Piyungan. Program ini juga menjadi indikasi bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga terjadi di tingkat paling rendah atau Mikro.

Dari program peningkatan PHBS tersebut ada perubahan prilaku masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan konkret PHBS ialah pemeriksaan

kesehatan dan pelatihan serta penyuluhan tentang dampak sampah pada kesehatan. Sebagai bukti, dalam wawancara dengan Maryono salah satu pemulung dan juga ketua Komunitas Mardiko mengatakan:

Dulunya sebelum ada program PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat), itu, makan tidak membasuh (tangan) dahulu langsung makan saja. Sehingga dulu pemulung sering terjangkit penyakit, seperti muntaber, diare, dsb. tapi setelah ada pengarahan dan pelatihan, kita jadi tahu kalo makan (setelah memegang sampah) harus cuci tangan atau minimal dilapisi plastik tangannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perubahan prilaku masyarakat terjadi setelah dilaksanakan program PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) tersebut. Ini terjadi karena pemulung bertambah wawasan dan pengetahuannya terhadap kebersihan dan kesehatan. Selain itu masih banyak lagi program yang sifatnya mengedukasi pemulung, Maryono juga mengemukakan:

Selain itu banyak sekali, pernah melaksanakan pelatihan pengoperasian komputer, yang sebelumnya tidak bisa mengoperasikan komputer sekarang alhamdulillah bisa walau belum maksimal, jadi kalo mau bikin surat atau laporan atau proposal sudah bisa sendiri. Ada juga pelatihan koperasi. Dan juga ada pelatihan membaca *igro'* karena masih banyak pemulung (yang beragama islam) belum bisa membaca Al-qur'an. Ada juga pelatihan manajemen keuangan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, dan termasuk pelatihan-pelatihan dibidang kesehatan

Dari hasil wawancara dengan salah satu pemulung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini berhasil melaksanakan programnya hingga terjadinya perubahan prilaku masyarakat atau pemulung ke arah lebih baik. Ini menjadi indikator bahwa strategi pemberdayaan pada

tingkat Mikro yakni *self-awareness* dengan cara memfasilitasi pengembangan potensi individual berhasil dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah karena dari dalam individu atau sosial bersangkutan. Oleh karena itu penuntasan kemiskina adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri diatas kakinya sendiri, serta memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri.

Sama halnya dengan yang terjadi di TPST Piyungan, pemberdayaan dengan tujuan mengubah prilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat juga pada hakikatnya harus berasal dari dalam diri pemulung itu sendiri. Berdasarkan program yang telah dilakukan MPM PP Muhammadiyah tidak heran jika sebagian besar program bersifat pelatihan dan penyuluhan. Ini karena untuk mendorong kemampuan dan pengetahuan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran terkait hidup sehat. Sehingga diharapkan ini berpengaruh pada prilaku pemulung dalam melakukan kegiatan di tumpukan sampah tersebut.

Terbukti dengan hasil pembahasan diatas, MPM PP Muhamadiyah telah berhasil mencapai proses penyadaran pada pola pikir pemulung. secara teori, strategi MPM PP Muhammadiyah juga berhasil dalam proses pemberdayaan di TPST Piyungan.

4.4.2. Level Meso

Pemberdayaan pada level Meso maksudnya pemberdayaan pada tingkat menengah. Pemberdayaan pada tingkat ini fokus pada Lingkungan dan Komunitas. Sasaran pemberdayaan pada level ini berbentuk Norma Sosial

ataupun Nilai-Nilai Kultur. Sehingga objek atau tujuan pemberdayaan pada level ini berupa *social networking* yaitu membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi kebutuhan individu.

Pembentukan MARDIKO (Makaryo Adi Ngayogyakarta) menjadi salah satu indikasi terciptanya proses pemberdayaan di tingkat meso ini berjalan dengan baik. Mardiko merupakan komunitas yang beranggotakan Pahlawan Lingkungan dari TPST yang diprakarsai MPM PP Muhammadiyah. Selain itu, pembentukan komunitas ini bertujuan meningkatkan keakraban dan ajang silaturahmi di antara anggota, meningkatkan kesejahteraan Pahlawan Lingkungan Hidup TPST Piyungan. Serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi anggota Mardiko kepada pengelola TPST dan pemerintah terkait.

Komunitas diresmikan 10 April 2016 diketuai Maryono, Sekretaris Imam Nahrowi, dan Bendahara Shokiman. Komunitas Mardiko memiliki aturan yang harus dipatuhi anggotanya. Di antaranya, anggota yang tergabung dalam Mardiko wajib membayar iuran bulanan sebesar Rp 2.000. Anggota wajib menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan di lingkungan TPST. Anggota wajib mentaati keputusan pengurus dalam penataan lapak. Anggota wajib menjaga kerukunan dan kesejahteraan antara pengelola, pengepul dan masyarakat. Bila terbukti melanggar aturan, anggota bersedia dikeluarkan dari komunitas dan tidak diperkenankan memulung di TPST Piyungan.

Sedang agenda rutin, kata Maryono, pertama, pertemuan pengurus sebulan sekali, setiap Ahad Wage. Kedua, pertemuan pengurus dan pengepul

untuk sosialisasi agenda pengurus ke anggota, serta membahas persoalan yang muncul. Ketiga, pertemuan rutin besar antara pengurus, pengepul, dan pemulung. Pertemuan akbar ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Maryono, selaku ketua Komunitas Mardiko, mengatakan

Setelah adanya Komunitas Mardiko ini pemulung terbantu sekali. Sebelumnya kalau ada apa-apa pemulung tidak terkoordinasi dengan baik, contohnya kalau ada bantuan atau apa, itu tidak terbagi dengan adil. Namun setelah adanya Mardiko ini, semua jadi terkoordinasi dengan baik dan adil. Karena kita punya data lengkap semua pemulung. Jadi pemulung antusias sekali dengan adanya Mardiko ini

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa warga komunitas pemulung sangat terbantu terbentuknya Mardiko. Ini karena, pemulung lebih terorganisir. Semua program yang dilakukan di TPST Piyungan terealisasi secara adil ke semua pemulung. Sehingga jika nantinya akan ada program kembali semua pemulung merespon dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya fokus pada satu bidang. Pemberdayaan harus mencakup berbagai bidang atau aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, bahkan spiritual. Ini disebabkan kompleksitas masalah pada masyarakat tersebut. Contoh jika masalah dalam pemberdayaan masyarakat ialah masalah kesehatan, maka ekonomi dan spiritual masyarakat juga harus diperhatikan dan menjadi pendukung utama dari program kesehatan tersebut.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus mengembangkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meskipun program utama ialah di bidang kesehatan dan PHBS

(Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) namun upaya itu tidak akan efektif jika tidak didorong faktor lainnya. Upaya ini mulai dilakukan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk lebih menunjang program utama, contohnya berbagai pelatihan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan.

MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berhasil mendorong *stakeholder* terkait untuk ikut terlibat dalam program di TPST Piyungan ini yakni Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Program dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini berupa pelatihan dibidang Usaha Mikro yakni pengolahan pangan berupa Mie Ayam, Keripik serta Pastel Pisang.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat diukur dengan partisipasi masyarakat. Ini karena semakin banyak masyarakat yang aktif terlibat dalam program tersebut berarti semakin tinggi prinsip demokratis dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat disini maksudnya bukan hanya sekedar partisipasi fisik dan pembangunan semata. Namun lebih dari itu, masyarakat terlibat aktif secara fisik maupun psikis sehingga terjadinya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar, dan peningkatan hidup menjadi lebih baik.

Menurut Asngari (dikutip dalam Anwas, 2014: 93), partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah individu atau masyarakat terlibat aktif dalam: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) keterlibatan dalam pengawasan, (3) keterlibatan dimana masyarakat mendapat manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi sebagai proses pemberdayaan atau bermakna

kemitraan (*partnership*), (6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *stakeholder* menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan, dan penggunaan sumber daya yang bermanfaat bagi mereka. Ini artinya dalam pemberdayaan, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, mendapatkan manfaat atau penghargaan dari hasil pemberdayaan tersebut, serta bermitra dengan berbagai pihak.

Partisipasi masyarakat ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat oleh MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di TPST Piyungan. Sebagai bukti anggota komunitas Mardiko selalu bertambah dari tahun ke tahun. Maryono selaku ketua Komunitas Mardiko mengatakan “awal pembentukan ada sekitar 450 anggota dan sampai sekarang sudah bertambah sekitar 570 anggota” (Maryono, 2018)

Peneliti menemukan fakta menarik terkait keberhasilan proses pemberdayaan MPM PP Muhammadiyah. Maksudnya ialah keberhasilan merangkul semua elemen masyarakat atau pemulung. Sebagai bukti, Program selanjutnya yang akan dilakukan MPM PP Muhammadiyah bersama Komunitas pemulung yakni pembangunan sarana air bersih. Yaitu sarana cuci tangan yang akan ditempatkan di tiga titik di sekitar TPST. Dalam wawancara dengan Maryono, selaku ketua Komunitas Mardiko, mengemukakan:

Ini sudah tahap survey dan insyaAllah dalam waktu dekat akan direalisasikan. Semua warga setuju, bahkan dari kepala dusun sudah mendukung sekali. Mardiko serta warga sekitar sudah siap menjadi sukarelawan untuk tenaga dan bantu sedikit dari finansial untuk realisasi program ini. Bahkan tiga titik yang akan dipakai itu sudah diwakafkan dan menyerahkan sertifikat (tanah) nya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa MPM PP Muhammadiyah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan ini. Semua elemen masyarakat mendukung bahkan berinisiatif untuk membantu baik dalam hal tenaga dan juga dari segi finansial.

Berdasarkan pembahasan diatas, strategi MPM PP Muhammadiyah pada level Meso ini berjalan dengan baik dan berhasil. Partisipasi merupakan bukti bahwa strategi pemberdayaan yang memanfaatkan nilai-nilai kultur di masyarakat kita berupa gotong-royong menjadi kekuatan pemberdayaan. sehingga, pemberdayaan dengan sasaran *social networking* atau membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi kebutuhan individu terrealisasi dengan baik. Ini karena dari pembentukan Mardiko yang membantu pemulung dalam koordinasi setiap saat.

4.4.3. Level Makro

Pemberdayaan pada Level makro ialah pemberdayaan dengan menysar Struktur Sosial, Sistem Politik, Ideologi, Kebijakan Pemerintah, Lingkungan. Sehingga objek atau tujuan pemberdayaan pada level ini ialah *Full Participation of Community*; Sistem yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Upaya MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengadvokasi pemerintah, dinas, dan berbagai macam *stakeholder* menjadi strategi di level makro. TPST Piyungan menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 tahun 2014 maka pada tahun 2015 sampai sekarang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional

diserahkan kembali kepada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (Balai PISAMP). BALAI PISAMP sendiri merupakan sub Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu wewenang dan tanggung jawab berada pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lazizmu bersama Mardiko (Makaryo Adi Ngayogyakarta) telah melaksanakan program “Workshop Pemberdayaan Komunitas Pemulung TPST Piyungan” yang diadakan di DPD RI DIY (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta) Kamis (4/5/2017).

MPM PP Muhammadiyah menggelar workshop bertujuan untuk melihat gambaran komprehensif tentang kondisi pemulung dan TPST Piyungan yang akan menjadi sumber dalam menyusun blue print pemberdayaan pemulung khususnya di TPST Piyungan. Dalam workshop dibahas mengenai beberapa topik penting terkait strategi yang tepat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, menemukan kegiatan yang dapat membantu para pemulung dalam peningkatan keterampilan sehingga dapat memberikan alternatif pendapatan lain bagi pemulung. MPM juga memberikan advokasi kebijakan yang berpihak pada pemulung dan masyarakat sekitar TPST dan menemukan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan di TPST Piyungan.

Terkait peran pemerintah terhadap pemerintah terkait TPST Piyungan, Maryono berpendapat:

Sebelum MPM PP Muhammadiyah, tidak ada bantuan apapun mas, tidak ada sama sekali program kepada pemulung, setelah ada MPM PP Muhammadiyah yang kesana kemari me-lobi dinas dan pemerintah dan instansi-instansi, alhamdulillah banyak dinas-dinas yang masuk kesini, seperti Dinas Sosial, Dinas kesehatan, dan Dinas Koperasi.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah belum ada sama sekali program di TPST Piyungan. Maksudnya, pemerintah tidak ada program sama sekali yang sasaran utamanya adalah pemulung. Pemerintah dan Dinas terkait melakukan program pemberdayaan kepada pemulung di TPST Piyungan setelah dilakukannya advokasi oleh MPM PP Muhammadiyah. Ini menunjukkan strategi MPM PP Muhammadiyah pada level Makro ini berjalan dengan baik, terbukti dengan masuknya beberapa dinas terkait yang melakukan program pemberdayaan kepada pemulung, seperti Dinas Sosial yang mengadakan Pelatihan Pengolahan Pangan, Dinas Kesehatan yang melakukan Pemeriksaan kesehatan dan juga Dinas Koperasi yang melakukan Pelatihan Pendirian dan Pengelolaan Koperasi. Sehingga, *full-participation of community* tercapai dan terciptanya sistem yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pemberdayaan *Bottom-Up* ialah pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat. Program yang dilakukan pada hakikatnya harus berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri. Ini terjadi karena permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat juga saling terkait, maka pemberdayaan sulit dilakukan jika hanya dilakukan secara sebagian (parsial). Ini juga relevan dengan prinsip pemberdayaan yang harus bergantung pada kebutuhan, masalah dan potensi masyarakat. Sebaliknya, pemberdayaan *Top-Down* ialah pemberdayaan atau pembangunan yang

berbasis pada kebijakan pemangku kepentingan, seperti yang dilakukan Pemerintah dan dinas terkait. Ini berdasar pada asumsi bahwa pemerintah atau dinas terkait mempunyai solusi terbaik pada suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat (Anwas, 2014: 101).

Pada awal proses pemberdayaan di TPST Piyungan MPM PP Muhammadiyah melakukan program “Brainstorming dan Pemetaan Potensi Pahlawan Lingkungan”. Program yang dilakukan pada awal pemberdayaan di TPST Piyungan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan, kebutuhan serta potensi pemulung. Program ini juga turut mengundang, instansi atau *stake holder* terkait yang mempunyai pengetahuan lebih terhadap TPST Piyungan. Secara teori, program ini bisa diartikan sebagai pola pemberdayaan *bottom-up*. Karena pemberdayaan dilaksanakan dengan berdasar pada kebutuhan, masalah bahkan potensi pemulung..

Proses yang melibatkan berbagai instansi dan dinas terkait inilah yang menjadi pemicu mereka, *stake holder* ikut berpartisipasi terhadap proses pemberdayaan. sehingga pola *bottom-up* dalam kasus pemberdayaan masyarakat di TPST Piyungan yang dilakukan MPM PP Muhammadiyah ini menjadi salah satu strategi yang berperan dalam tingkat Makro ini. Ini karena Dinas dan Instansi terkait menjadi respoonsif terhadap kebutuhan pemulung